



PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS IB



2023

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah terucap hanya kepada Allah Swt, karena berkat rahmat dan karunianya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Maros Tahun 2023 mampu kami selesaikan sesuai waktu dan ketentuan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Maros Tahun 2023 ini disusun untuk memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4108/SEK/OT1.6/12/2023, tanggal 19 Desember 2023.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan hasil implementasi dan realisasi (secara kualitatif maupun kuantitatif) terhadap seluruh program dan kegiatan Pengadilan Agama Maros selama kurun waktu tahun 2023 Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini juga merupakan gambaran secara utuh, komprehensif dan transparan tentang kondisi obyektif Pengadilan Agama Maros sebagai bagian dari implementasi prinsip-prinsip *good governance, clean and clear*.

Kami menyadari bahwa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini belum menghasilkan sesuatu yang sempurna, baik ditinjau dari aspek substansinya, redaksional maupun dari sisi tampilannya. Oleh karena itu, masukan dari para pembaca berupa kritik dan saran yang bersifat konstruktif kami sangat harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini di masa-masa yang akan datang.

Selanjutnya, kepada semua pihak (internal/eksternal) yang ikut berperan dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, kami ucapkan dan sampaikan apresiasi, terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga karya dan pengabdian kita bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin.

Maros, 28 Desember 2023
Ketua Pengadilan Agama Maros



Irham Riad, S.H.I., M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	4
BAB II A. Keadaan Perkara	7
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	7
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	8
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	8
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	9
B. Penyelesaian Perkara	9
1. Jumlah sisa perkara yang diputus	10
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	10
3. Jumlah perkara tidak Banding, Kasasi, dan PK	10
4. Jumlah perkara yang berhasil di Mediasi	10
5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	10
C. Capaian Prioritas Nasional	11
1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	11
2. Sidang Keliling/Sidang Terpadu	11
3. Perkara Prodeo	12
BAB III Sumber Daya Manusia	13
1. Mutasi	15
2. Promosi	17
3. Pensiun	18
4. Diklat (SDM Teknis/nonteknis)	18
BAB IV Keuangan, Sarana Prasarana, Teknologi Informasi	23
A. Pengelolaan Keuangan	23
B. Pengelolaan Sarana dan prasarana	27
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	29
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik	33
1. Pembangunan Zona Integritas	33
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	34
3. Inovasi Pelayanan Publik	34
BAB VI Pengawasan	
A. Internal	39
B. Evaluasi	43
BAB VII Penutup	
A. Kesimpulan	44
B. Rekomendasi	45

BAB I PENDAHULUAN

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu perwujudan dari sebuah negara hukum, sehingga dalam proses bernegara tersebut sangatlah berpedoman kepada hal-hal yang sifatnya akuntabel. Hal tersebut berarti bahwa setiap lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada setiap akhir tahun harus memberikan pertanggungjawaban kepada negara, baik secara formil maupun materil, tidak terkecuali Mahkamah Agung RI, termasuk Pengadilan Agama Maros Kelas IB sebagai salah satu entitas terbawah dari lembaga yudikatif Mahkamah Agung RI.

Proses peradilan dengan azas “cepat, sederhana, dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah menjadi landasan utama lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak terkecuali lembaga peradilan agama, termasuk Pengadilan



Agama Maros Kelas IB.

Pengadilan Agama Maros, sebagai salah satu garda terdepan Mahkamah Agung RI mempunyai Visi **Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Maros Kelas IB Yang Agung**

dimana Visi tersebut dijabarkan dalam bentuk Misi, yaitu:

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Maros;**
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan;**
- 3. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Maros;**
- 4. Meningkatkan Kinerja Pengadilan Agama Maros yang Berbasis Teknologi Informasi.**

Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan, adalah merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003, yang selanjutnya sejalan dengan amanat reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kemenpan dan RB.

Reformasi birokrasi telah dilakukan di Pengadilan Agama Maros, baik terhadap tata kelola keperkaraan maupun administrasi umum, namun tidak bisa di pungkiri masih terdapat kelemahan di berbagai sisi sebagai akibat dari hal-hal yang sifatnya manajemen-sistemik. pengawasan internal bagi para pejabat Pengadilan Agama Maros, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan Agama Maros, menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan kerja seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Maros.

Pengadilan Agama Maros, dalam kurun waktu Tahun 2023, telah banyak melakukan perubahan-perubahan dan bahkan pembaharuan, baik pada tataran birokrasi penerimaan perkara, pengelolaan/penanganan administrasi keperkaraan, dan pengelolaan/penanganan administrasi umum, yang hampir semuanya berbasis Teknologi Informasi (IT) dengan menggunakan berbagai aplikasi (komputerisasi), dengan tetap berpegang pada nilai-nilai proporsional, professional, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan termasuk masyarakat yang kurang mampu, maka pada tahun 2023 Pengadilan Agama Maros telah menjalankan program berperkara secara cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi, layanan Posbakum bagi masyarakat yang kurang memahami hukum, serta sidang diluar gedung pengadilan untuk menjangkau desa/kelurahan yang secara geografis dan transportasi sulit dan

mahal, yang semuanya dibiayai oleh APBN TA. 2023 dengan berorientasi pada terlaksananya pelayanan hukum yang mudah, murah, serta berkeadilan, termasuk juga adanya sistem informasi perkara (SIPP) dan lain-lain.

Persentase kinerja bidang pelayanan teknis yustisial Pengadilan Agama Maros Kelas IB, pada tahun 2023 terjadi Penurunan volume perkara yang masuk, yaitu 950 perkara, dan sisa perkara tahun 2022 sejumlah 44 perkara, sehingga total perkara yang masuk tahun 2023 adalah 994 perkara. Dari total Perkara tersebut, yang di selesaikan sejumlah 990 perkara, atau (99,60%), sehingga sisa perkara tahun 2023 adalah 4 perkara (0,4%). Dari persentase perkara tersebut, tentunya membutuhkan energi lebih bagi seluruh entitas Pengadilan Agama Maros untuk senantiasa meningkatkan kinerja yang kualitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing, mau dan berani melakukan inovasi-inovasi yang sifatnya kompetitif.

Dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, Pengadilan Agama Maros Kelas IB mempunyai wilayah yurisdiksi, sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Kecamatan Mandai | 8. Kecamatan Turikale |
| 2. Kecamatan Moncongloe | 9. Kecamatan Lau |
| 3. Kecamatan Maros Baru | 10. Kecamatan Camba |
| 4. Kecamatan Bantimurung | 11. Kecamatan Tompobulu |
| 5. Kecamatan Simbang | 12. Kecamatan Cenrana |
| 6. Kecamatan Tanralili | 13. Kecamatan Bontoa |
| 7. Kecamatan Marusu | 14. Kecamatan Mallawa |



BAB II KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maros

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Maros Kelas IB selama tahun 2023 lebih di dominasi oleh perkara dengan jenis Cerai Gugat, Cerai Talak dan Isbat Nikah dengan penyebabnya di dominasi oleh masalah Perselisihan dan pertengkarannya.

Pengadilan Agama Maros Kelas IB, selama tahun 2023 melalui para Hakim, Panitera, dan Jurusita, secara sistemik telah mengolah dan menyelesaikan perkara selama kurun waktu 2023. Secara umum, berikut ini keadaan perkara Pengadilan Agama Maros Kelas IB tahun 2023, seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

Presentase Perkara Tingkat Pertama Tahun 2023

NO	JENIS PERKARA	TERIMA	PUTUS	SISA
1	Izin Poligami	2	2	-
2	Pembatalan Perkawinan	-	-	-
3	Cerai Talak	139	139	-
4	Cerai Gugat	467	466	1
5	Harta Bersama	1	1	-
6	Penguasaan Anak	2	2	-
7	Pengesahan Anak	-	-	-
8	Perwalian	20	20	-
9	Asal Usul Anak	2	2	-
10	Itsbat Nikah	259	259	-
11	Dispensasi Nikah	16	16	-
12	Wali Adhal	1	1	-
13	Kewarisan	5	4	1
14	Hibah	-	-	-
15	Ekonomi Syariah	2	2	-
16	Penetapan Ahli Waris	26	26	-
17	Lain - Lain	8	7	1
J u m l a h		950	947	3

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Perkara di tingkat Banding lebih di dominasi oleh perkara cerai gugat, dan cerai talak Selama tahun 2023 perkara Banding yang masuk di Pengadilan Agama adalah sejumlah 6 perkara. Adapun keadaan perkara tingkat Banding seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Presentase Perkara Tingkat Banding

Tahun 2023

NO	JENIS PERKARA	TERIMA	PUTUS	SISA
1	Izin Poligami			
2	Pembatalan Perkawinan			
3	Cerai Talak	2	2	-
4	Cerai Gugat	2	2	-
5	Harta Bersama	1	1	-
6	Penguasaan Anak			
7	Hibah			
8	Asal Usul Anak			
9	Pengangkatan Anak			
10	Itsbat Nikah			
11	Dispensasi Nikah			
12	Wali Adhal			
13	Ekonomi Syari'ah	1	1	-
14	Kewarisan			
15	Penetapan Ahli Waris			
16	Lain-lain			
Jumlah		6	6	-

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pengadilan Agama Maros Kelas IB selama tahun 2023 tidak menerima perkara Kasasi. Hal ini terlihat pada tabel dibawah ini:

Presentase Perkara Tingkat Kasasi

Tahun 2023

NO	JENIS PERKARA	TERIMA	PUTUS	SISA
1	Izin Poligami	-	-	-
2	Pembatalan Perkawinan	-	-	-
3	Cerai Talak	-	-	-
4	Cerai Gugat	-	-	-
5	Harta Bersama	-	-	-
6	Hibah	-	-	-
7	Perwalian	-	-	-

8	Asal Usul Anak	-	-	-
9	Pengangkatan Anak	-	-	-
10	Itsbat Nikah	-	-	-
11	Dispensasi Nikah	-	-	-
12	Wali Adhal	-	-	-
13	Ekonomi Syari'ah	-	-	-
14	Kewarisan	-	-	-
15	Penetapan Ahli Waris	-	-	-
16	Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

4. Keadan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Perkara ditingkat Peninjauan Kembali tahun 2023 adalah 1 perkara ,sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Presentase perkara Tingkat Peninjauan Kembali Tahun 2023

NO	JENIS PERKARA	TERIMA	PUTUS	SISA
1	Izin Poligami			
2	Pembatalan Perkawinan			
3	Cerai Talak			
4	Cerai Gugat			
5	Harta Bersama			
6	Penguasaan Anak			
7	Perwalian			
8	Asal Usul Anak			
9	Pengangkatan Anak			
10	Itsbat Nikah			
11	Dispensasi Nikah			
12	Wali Adhal			
13	Ekonomi Syari'ah			
14	Kewarisan	1	-	1
15	Penetapan Ahli Waris			
16	Lain-lain			
	J u m l a h	1	-	1

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Perkara yang masuk tahun 2023 di Pengadilan Agama Maros Kelas IB sejumlah 950 perkara, sisa perkara tahun 2022 sejumlah 44 perkara, sehingga total perkara masuk selama kurun waktu 2023 adalah sejumlah 994 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, yang berhasil diputus/diselesaikan sejumlah 990 perkara atau 99,60 %, sehingga sisa perkara tahun 2023 sejumlah 4 perkara atau 0,4%.

Berdasarkan keadaan perkara tersebut, bahwa jumlah perkara yang masuk antara tahun 2022 dan 2023 dari sisi kuantitas ada penurunan dengan persentase sekitar 4,15 %.

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Perkara yang diputus tepat waktu tahun 2023, yaitu perkara yang diputus dibawah jangka waktu 5 bulan adalah sejumlah 980 perkara, sedangkan yang diputus diatas 5 bulan adalah sebanyak 1 perkara

3. Jumlah Perkara yang Tidak Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Perkara yang putus dan telah berkekuatan hukum tetap (*incrach*) di Pengadilan Agama Maros Kelas IB selama tahun 2023, yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK adalah sejumlah 988 perkara. Artinya ada 6 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali.

4. Jumlah Perkara yang Berhasil di Medisai

Jumlah perkara yang di Mediasi tahun 2023 di Pengadilan Agama Maros Kelas IB adalah sejumlah 114 perkara, yaitu yang berhasil di Mediasi sejumlah 6 perkara, tidak berhasil 97 perkara, berhasil sebahagian 11 perkara. Pada umumnya pihak-pihak yang berhasil di Mediasi karena masih adanya kesadaran diri dari pihak-pihak yang berperkara setelah mendengar masukan/ pandangan dari para Hakim Mediator.

5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan terkait dengan

kompetensi mengadili oleh Pengadilan Agama Maros Kelas IB, maka untuk perkara anak yang berhasil melalui Diversi adalah nihil.

C. Capaian Prioritas Nasional

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pengadilan Agama Maros 2023 melaksanakan layanan Pos (Posbakum), dan layanan APBN TA. 2023 melalui DIPA Agung RI. Selama kurun waktu hukum telah melaksanakan



Kelas IB pada tahun Bantuan Hukum tersebut di biyai oleh (04) Badilag Mahkamah tahun 2023, Pos bantuan kewajibannya di bidang

pelayanan hukum kepada masyarakat/pencari keadilan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros Kelas IB. Layanan Posbakum dengan jumlah layanan 801 orang . Pagu anggaran untuk Posbakum TA. 2023 adalah Rp. 60.000.000,- (*Enam puluh juta rupiah*), dengan realisasi 100 % , yaitu Rp. 60.000.000 (*Enam puluh juta rupiah*),

2. Sidang Keliling

Pengadilan Agama Maros Kelas IB padatahun 2023 mendapatkan anggaran kegiatan Sidang keliling, dengan Pagu anggaran sejumlah Rp35.350.000,-(*Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus ribu rupiah*),dengan realisasi sejumlah Rp.30.450.000,- (*Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh ribu rupiah*) atau realisasi 86,14% ,- Sidang keliling tersebut dilaksanakan, dengan jumlah perkara 85 perkara. Untuk target adalah 38 perkara dengan 14 kali kegiatan, namun Pengadilan Agama Maros mampu melaksanakan sidang di luar gedung melebihi target perkara yang telah ditentukan.



3. Perkara Prodeo

Tahun 2023, Pengadilan Agama Maros Kelas IB mendapatkan anggaran kegiatan prodeo, dengan Pagu anggaran sejumlah Rp. 5.865.000.,-(*lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*), dengan realisasi Rp. 3.700.000 (*tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) dengan persentase realisasi sebesar 63.09 %. Selama tahun 2023, perkara Prodeo dilaksanakan dengan realisasi sebanyak 15 (lima belas) Perkara. Adapun dengan realisasi 15 perkara tersebut dapat disimpulkan bahwa target 15 perkara dengan Anggaran Rp. 5.865.000 di DIPA 04 Pengadilan Agama Maros, bahwa target Out Put Perkara Prodeo telah tercapai 100% dengan anggaran yang lebih kecil , adapun anggaran yang masih tersisa sebesar Rp. 2.165.000 telah diusahakan untuk direalisasikan sepenuhnya , namun dikarenakan perkara prodeo merupakan perkara yang memiliki syarat tertentu untuk bisa direalisasikan kepada para pencari keadilan yang memenuhi syarat sehingga anggaran tersebut masih tersisa.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Maros Kelas IB sampai tanggal 31 Desember 2023 adalah berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang. Dari jumlah tersebut, Hakim sebanyak 5 (lima) orang, 17 orang Kepaniteraan, 6 orang Kejurusitaan, 9 orang Kesekretariatan . Selengkapnya Nampak dalam tabel dibawah ini :

**Daftar Pejabat dan Aparatur Sipil Negara
Pengadilan Agama Maros Kelas IB Tahun 2023**

NO	N A M A	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1	Irham Riad.,S.H.I, M.H.	19791229.200604.1.002	Ketua
2	Muhammad Arief , S.H.I.	19770723.200604.1.003	Wakil Ketua
3	Mahyuddin, S.H.I, M.H.	19780111.200502.1.004	Hakim
4	Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.	19800504.200312.1.002	Hakim
5	Ahmad Zaki Yamani, S.H.	19840417.200904.1.009	Hakim
6	Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.	19900518.201212.1.004	Panitera
7	Kaharuddin, S.Kom., S.H.M.H.	19800208.200904.1.002	Sekretaris
8	Sitti Harsani, S.Kom.	19790701.200904.2.004	Ka.Subbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan
9	Ahmad Fadly, S.H.I	19820209.200912.1.004	Ka. Subbag kepeg dan Ortala
10	Alfiand Apriadi, S.Kom.	19880409.201101.1.001	Ka. Subbag Umum dan Keuangan
11	Hj. St. Munirah D., S.H.I.	19641010.198401.2.001	Panitera Muda Gugatan
12	Nur Uliya Arif, S.H.	19810106.200912.2.002	Panitera Muda Hukum
13	Nur Qalbi Patawari, S.Ag.	19711220.199202.2.001	Panitera Muda Permohonan
14	Surahmawati M., S.H.	19851128.200805.2.001	Panitera Pengganti

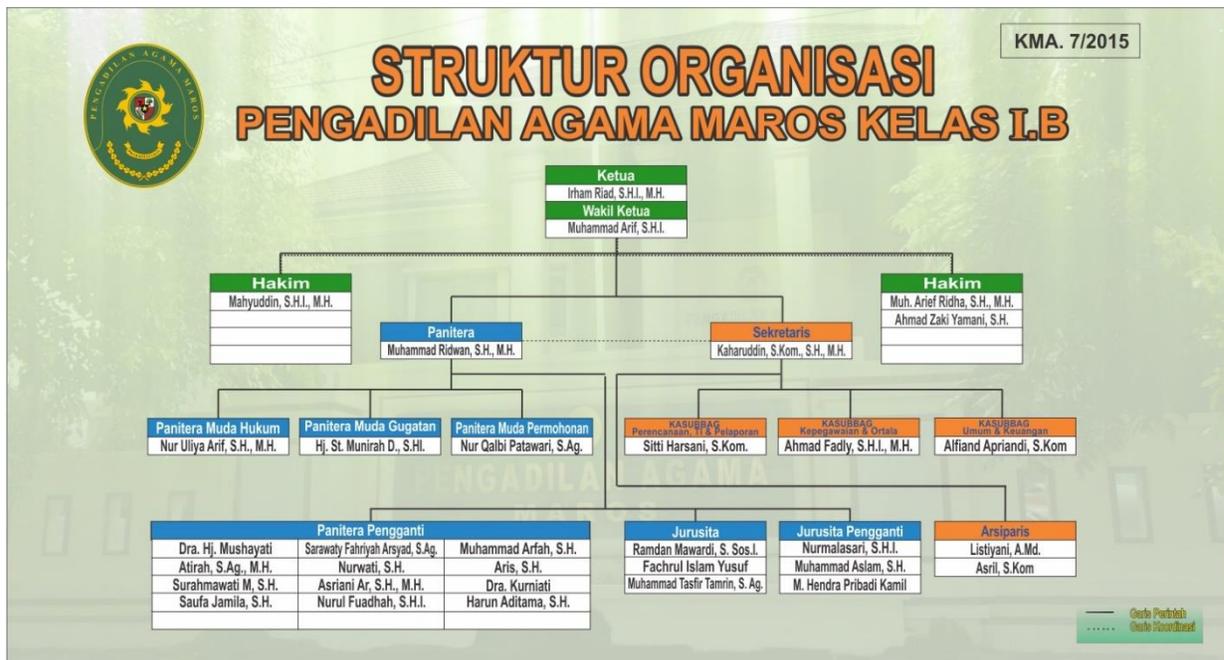
15	Dra. Hj. Mushayati	19661205.199402.2.001	Panitera Pengganti
16	Sarawaty Fahriyah Arsyad, S. Ag.	19740311.200012.2.001	Panitera Pengganti
17	Hj.Rinalty, S.Ag.,M.H.	19710724.200312.2.002	Panitera Pengganti
18	Saufa Jamila, S.H.	19780607.200904.2.003	Panitera Pengganti
19	Atirah, S.Ag., M.H.	19700617.200312.2.001	Panitera Pengganti
20	Dra. Kurniati	19691012.200112.2.001	Panitera Pengganti
21	Nurwati, S.H.	19720203.199503.2.001	Panitera Pengganti
22	Muhammad Arfah, S.H.	19691217.200012.1.001	Panitera Pengganti
23	Harun Aditama, S.H.	19780525.201101.1.001	Panitera Pengganti
24	Nurul Fuadhah, S.H.I	19830101.200901.2.020	Panitera Pengganti
25	Asriani. Ar.S.H.	19720516.200112.2.001	Panitera Pengganti
26	Aris, S.H.	19660422.199402.1.001	Panitera Pengganti
27	Fachrul Islam Yusuf	19830816.200604.1.002	Juru Sita
28	Ramdan Mawardi, S.Sos.I.	19750914.200912.1.003	Juru Sita
29	Muh. Tasfir Thamrin, S.Ag.	19780707.201408.1.001	Juru Sita
30	Muhammad Hendra Pribadi Kamil, A.Md	19840820.201501.1.001	Jurusita Pengganti
31	Nurmala Sari, S.H.I.	19820207.201101.2.010	Jurusita Pengganti
32	A. Muhammad Aslam, S.H.	19831120.201508.1.001	Jurusita Pengganti
33	Asril. S.Kom	19830421.201001.1.121	Arsiparis pertama
34	Gusmail Emmang, S.E.	19931226.202203.1.001	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
35	Listiyani, A.Md.	19870907.202012.2.005	Arsiparis Pelaksana
36	Nur Aeni, A.Md.A.B.	19980910.202203.2.019	Pengelola Perkara
37	Santi Pebiana, A.Md.	19950227.202203.2.012	Pengelola BMN

Pengadilan Agama Maros Kelas IB selama kurun waktu 2023 juga mempekerjakan tenaga honorer sejumlah 8 (delapan) orang yang ditanggung DIPA, yaitu 4 orang Pramubakti, 2 Orang Sopir dan 2 orang tenaga Satuan Pengamanan (Satpam).

Daftar Tenaga Honorer Pengadilan Agama Maros Kelas IB Tahun 2023

NO	N A M A	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	4	5
1	Hasruddin, S.HI	Pramubakti (Staf Umum)	S1 Hukum Islam
2	Magfirah, SHI.	Pramubakti (Staf Kepaniteraan)	S1 Hukum Islam
3	Zainuddin	Satpam	SMA
4	Arifuddin, S.Kom	Pramubakti (Staf IT)	S1 Ilmu Komputer
5	Supriadi	Driver	SMA
6	Ahmad Dani Muhaimin	Satpam	SMA
7	Ihsan, S.H.	Driver	S1 Ilmu Hukum
8	Fadliah Nisa Marsya, S.HI	Pramubakti (Staf Kepeg & Ortala)	S1 Ilmu Hukum

Sehubungan dengan uraian diatas, berikut in kami tampilkan bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Maros Kelas IB pertanggal 31 Desember 2023



1. Mutasi

Mutasi yang telah dilakukan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu mutasi pegawai berupa kenaikan pangkat, promosi dan pemindahan pegawai (masuk/keluar). Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan karir bagi pegawai tersebut agar supaya tidak

terjadi kejenuhan dalam melaksanakan tugas, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pengembangan kualitas sumber daya manusia itu sendiri dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

a. Mutasi Pangkat dan Jabatan

Selama tahun 2023, terdapat beberapa Pejabat dan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Maros Kelas IB yang naik pangkat, seluruhnya secara regular, baik periode April maupun period Oktober, seperti terlihat pada tabel dibawah ini

- *Periode April 2023*

NO	N A M A	NIP	MUTASI GOL	JABATAN	JENIS	KET

- *Periode Oktober 2023*

NO	N A M A	NIP	MUTASI GOL	JABATAN	JENIS	KET
1	A. Muhammad Aslam, S.H.	19831120.2015 08.1.001	II/b ke III/a	Jurusita Pengganti	reguler	selesai

- *Promosi Jabatan*

NO	N A M A	NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
2	Muhammad Hendra Pribadi Kamil, A.Md	19840820.201501.1.001	Pengadministrasi Pegawai	Jurusita Pengganti	

2. Promosi

Pada Tahun 2023, Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Maros Kelas IB, baik Hakim maupun pegawai yang mengalami promosi/mutasi jabatan (m a s u k / k e l u a r) adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang, yaitu sebagai berikut:

No	NAMA	NIP	TEMPAT TUGAS LAMA	TEMPAT TUGAS BARU	KET
1	2	3	4	5	6
1	Muhammad Arief , S.H.I.	19770723.200604.1.003	PA. Bulukumba	PA Maros	Masuk
2	Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.	19900518.201212 .1.004	PA. pangkajene	PA Maros	Masuk
3	Ahmad Fadly, S.H.I	19820209.200912.1 004	PA Pare Pare	PA Maros	Masuk
4	Alfiand Apriadi, S.Kom	19880409.201101.1.001	PTA Makassar	PA Maros	Masuk
5	Hj.Rinalty, S.Ag.,M.H.	19710724.200312.2.002	PA Palu	PA Maros	Masuk
6	Dra. Kurniati	19691012.200112.2.001	PA Bulukumba	PA Maros	Masuk
7	Harun Aditama, S.H.	19780525.201101.1.001	PA Masamba	PA Maros	Masuk
8	Asril. S.Kom	19660422 199402 1 001	Pemda Maros	PA Maros	Masuk
9	Ilmawati, S.E.	19850603.201001.2.033	Pemda Maros	PA Maros	Masuk
			PA Maros	PA makalae	Keluar
10	Syarifa Saimima, S.H.I.,M.H.	19771222 200604 2 002	PA. Maros	PA Kediri	Keluar
11	Andi Suryani Mattupuang, S.Kom	19790519 200904 2 006	PA. Maros	PA Sungguminasa	Keluar
12	Abdul Rahim, S. Ag, M.H.	19690511 200604 1 014	PA Maros	PA. Pare Pare	Keluar
13	Erni, S.H.	19731231 199402 2 004	PA Maros	PA.Sungguminasa	Keluar

3. Pensiun

Untuk tahun 2023 terdapat pegawai yang pensiun pada Pengadilan Agama Maros, adapun pegawai yang dimaksud adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET
1	2		3	4
1	Syarifuddin L	19630907.198402.1.001	Panitera Pengganti	Pensiun

4. Pendidikan dan Latihan

a. Tenaga Teknis (Fungsional)

Pendidikan dan latihan tenaga teknis selama tahun 2023, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	NIP	TANGGAL	NAMA DIKLAT
1	Irham Riad, S.H.I, M.H.	19791229. 200604. 1. 002	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
2	Drs. H. Muh. Hasbih, M.H	19590602. 198603. 1. 016	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
3	Dra. H. St. Masdanah	19591030. 198903. 2. 001	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
4	Mahyuddin, S.H.I, M.H.	19780111. 200502. 1. 004	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
5	Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.	19800504. 200312. 1. 002	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama

6	Ahmad Zaki Yamani, S.H.	19840417. 200904 .1. 009	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
7	Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.	19900518. 201212 .1. 004	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
			10 September – 11 septembar 2023	Bimbingan Teknis Kepaiteraan di Lingkungan PTA makassar
8	Kaharuddin, S.Kom., S.H.M.H.	19800208. 200904. 1. 002	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
9	Nur Uliya Arif, S.H.	19810106. 200912. 2. 002	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
10	Hj. St. Munirah D, S.H.I.	19641010. 198401. 2. 001	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
11	Nur Qalbi Patawari, S.Ag.	19711220. 199202. 2. 100	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
12	Muhammad Arfah, S.H.	19691217 200012 1 001	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
13	Asriani , AR, S.H.	19720516.200112.2.001	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama

14	Aris, S.H.	19660422 199402 1 001	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
15	Dra. Hj. Mushayati	19661205 199402 2 001	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
16	Sarawaty Fahriyah Arsyad, S.Ag.	19740311 200012 2 001	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
17	Surahmawati M, S.H.	19851128 200805 2 001	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
18	Syarifuddin	19630907 198402 1 001	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
19	Saufa Jamila, S.H.	19780607 200904 2 003	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
20	Harun Aditama, S.H.	19780525.201101.1.001	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
21	Nurul Fuadhah, S.H.I	19830101.200901.2.020	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
			5 Juli – 14 Juli 2023	Pelatihan Teknis Yudisial panitera/Panitera Pengganti
22	Atirah, S.Ag., M.H.	19700617.200312.2.001	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama

23	Dra. Kurniati	19691012.200112.2.001	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
24	Nurwati, S.H.	19720203.199503.2.001	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
25	Fachrul Islam Yusuf	19830816.200604.1.002	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
26	Ramdan Mawardi, S.Sos.I.	19750914.200912.1.003	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
27	Muh. Tasfir Thamrin, S.Ag.	19780707.201408.1.001	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
28	Nurmala Sari, S.H.I.	19820207.201101.2.010	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
29	A. Muhammad Aslam, S.H.	19831120.201508.1.001	22 September 2023	Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
30	Muhammad Hendra Pribadi Kamil, A.Md	19840820.201501.1.001	10 September – 11 septembar 2023	Bimbingan Teknis Kepaiteraan di Lingkungan PTA makassar

Tenaga Non Teknis (Struktural)

Pendidikan dan latihan tenaga non teknis selama tahun 2023

NO	NAMA	NIP	TANGGAL	NAMA DIKLAT
1.	Kaharuddin, S.kom	19800208.200904.1.002	13 November – 16 November 2023	Bimbingan Teknis ASN Angkatan I
2.	Ahmad Fadly, S.H.I	19820209.200912.1 004	13 November – 16 November 2023	Bimbingan Teknis ASN Angkatan I
3.	Alfiand Apriadi, S.Kom	19880409.201101.1.001	13 November – 16 November 2023	Bimbingan Teknis ASN Angkatan I

BAB IV

KEUANGAN, SARANA PRASARANA, TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Pada tahun anggaran 2023, Pengadilan Agama Maros Kelas IB mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu:

- SP DIPA-005.01.2.307445/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 6.248.096.000,- (*Enam milyar dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- SP DIPA-005.04.2.309069/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 101.215.000 (*Seratus satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah*).

Alokasi anggaran tersebut diatas diperuntukan untuk membiayai 2 (tiga) program utama yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung;
2. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama;

Anggaran dari masing-masing program tersebut diklasifikasikan ke dalam 3 jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Sampai akhir tahun 2023, kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Maros secara mikro dapat digambarkan sebagai berikut:

DIPA 01 MELIPUTI:

1) Belanja Pegawai

Kondisi riil pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Maros pada sektor belanja pegawai pada tahun 2023 adalah:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| - Pagu anggaran sebesar | = Rp. 4.858.377.000,- |
| - Realisasi sebesar | = Rp. 4.264.157.618,- |
| - Sisa Anggaran sebesar | = Rp. 594.219.382,- |
| - Persentase penyerapan anggaran | = 87,77 % |

- Pesentase sisa anggaran = 12,23 %

Dari tabel diatas, diketahui terdapat sisa anggaran sebesar 12,23 % Hal tersebut dikarenakan berlebihnya anggaran gaji pokok dan tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara terkait dengan mutasi (masuk/keluar) di Pengadilan Agama Maros Kelas IB.

2) Belanja Barang Operasional

Kondisi riil pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Maros pada sektor belanja barang operasional pada tahun 2023 adalah:

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 1.289.719.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 1,288,470,307,-
- Sisa Anggaran sebesar = Rp. 1,248,693,-
- Persentase penyerapan anggaran = 99.90%
- Persentase sisa anggaran = 0,1 %

Dari keterangan kinerja anggaran di atas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran untuk belanja barang operasional sudah tinggi dan hampir dapat direalisasikan secara keseluruhan (100%)

3) Belanja Modal

Pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Maros pada sektor belanja barang modal tahun 2023 adalah:

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 100.000.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 100.000.000,-
- Sisa Anggaran sebesar = Rp 0,-
- Persentase penyerapan anggaran = 100 %
- Persentase sisa anggaran = 0

Dari keterangan kinerja anggaran di atas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran untuk belanja Modal, dapat direalisasikan secara keseluruhan yakni (100%) .

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi DIPA 01 dengan pagu sebesar Rp6,248,096,000 adalah sebesar Rp5,652,627,925 atau 90.47%, dengan sisa anggaran sebesar Rp595,468,075, atau 9,53%. Adapun anggaran yang tersisa adalah dari pagu belanja pegawai yang tidak terealisasi secara keseluruhan, namun demikian secara keseluruhan, realisasi anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Maros sudah cukup Optimal dan sangat baik.

Laporan Neraca pada aplikasi SAKTI

Laporan Neraca pada aplikasi SAKTI , adalah sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (307445) PENGADILAN AGAMA MAROS

Tgl Data : 28/12/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 28/12/23 8:16 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	15,000,000	0	15,000,000	0.00
Persediaan	3,103,200	1,112,200	1,991,000	179.01
Persediaan yang Belum Diregister	8,850,500	0	8,850,500	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	26,953,700	1,112,200	25,841,500	2,323.46
ASET TETAP				
Tanah	4,227,100,000	4,227,100,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,295,805,599	2,538,736,057	(242,930,458)	(9.57)
Gedung dan Bangunan	8,040,308,200	7,839,959,000	200,349,200	2.56
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	100,349,200	(100,349,200)	(100.00)
Aset Tetap Lainnya	16,566,479	16,566,479	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,024,238,192)	(3,123,146,754)	98,908,562	(3.17)
JUMLAH ASET TETAP	11,555,542,086	11,599,563,982	(44,021,896)	(0.38)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	26,345,000	26,345,000	0	0.00
Aset Lain-lain	296,413,458	1,283,000	295,130,458	23,003.15
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(322,758,458)	(27,628,000)	(295,130,458)	1,068.23
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	11,582,495,786	11,600,676,182	(18,180,396)	(0.16)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	25,621,501	(25,621,501)	(100.00)
Utang Yang Belum Ditagihkan	14,596,389	0	14,596,389	0.00
Uang Muka dari KPPN	15,000,000	0	15,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	29,596,389	25,621,501	3,974,888	15.51
JUMLAH KEWAJIBAN	29,596,389	25,621,501	3,974,888	15.51
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	11,552,899,397	11,575,054,681	(22,155,284)	(0.19)
JUMLAH EKUITAS	11,552,899,397	11,575,054,681	(22,155,284)	(0.19)
JUMLAH EKUITAS	11,552,899,397	11,575,054,681	(22,155,284)	(0.19)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	11,582,495,786	11,600,676,182	(18,180,396)	(0.16)

DIPA 04

Kondisi riil pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Maros untuk DIPA 04 tahun anggaran 2023 yang merupakan jenis belanja barang adalah:

- Pagu anggaran sebesar	= Rp. 101.215.000,-
- Realisasi sebesar	= Rp. , 94.150.000
- Sisa Anggaran sebesar	= Rp. 7.065.000,
- Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 93,02 %
- Persentase sisa anggaran sebesar	= 06,98

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa secara umum realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Agama Maros untuk tahun anggaran 2023 cukup optimal, namun terjadi sisa anggaran berkaitan dengan belanja pembebasan biaya perkara dan juga sidang keliling.

PENDAPATAN HIBAH

Selama tahun 2023, Pengadilan Agama Maros tidak menerima hibah dalam bentuk peralatan dan mesin.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Pengadilan Agama Maros Kelas IB pada tahun 2023, adalah meliputi tanah, bangunan, inventaris/peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya, seperti terurai pada tabel dibawah ini:

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah (unit)	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Kepaniteraan	2	
7	Ruang Kesekretariatan	1	
8	Ruang Kejurusitaan	1	
9	Ruang Sidang	2	
10	Ruang Mediasi	1	
11	Ruang rapat Pimpinan	1	
12	Ruang pelayanan perkara	1	
13	Ruang tunggu sidang	2	

14	Ruang arsip perkara	1	
15	Ruang Perpustakaan	1	
16	Ruang Mushallah	2	Lt.1 & Lt. 2
17	Ruang bermain anak	1	
18	Ruang Server	1	
19	Gudang ATK	1	
20	Kamar mandi	11	Lt.1 & Lt. 2
21	Pos Satpam	1	

1. Sarana Dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Selama kurun waktu tahun 2023, terdapat pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pengadilan Agama Maros Kelas IB yaitu pengadnan Pembangunan Pos jaga

b) Pemeliharaan

Obyek pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Kantor Pengadilan Agama Maros tahun 2023 adalah pemeliharaan gedung kantor, yaitu, renovasi resepsionis dan lobby (lobby lt I), perbaikan , dan lain sebagainya.

c) Penghapusan.

Selama kurun waktu 2023, Pengadilan Agama Maros Kelas IB tidak melakukan kegiatan penghapusan pada sarana dan prasarana Gedung

2. Sarana Dan Prasarana Fasilitas Perkantoran

a. Pengadaan

Pada tahun 2023 tidak terdapat pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kantor Pengadilan Agama Maros Kelas IB yang bersumber dari DIPA TA. 2023

b. Pemeliharaan

Selama kurun waktu 2023, telah dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor berupa barang-barang inventaris meliputi peralatan dan mesin. Kendaraan Roda 4 ada 3 (tiga) unit, yaitu 2 (unit) adalah “hak milik” Mahkamah Agung RI dan 1 (satu) unit adalah “hak pakai” atau pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Maros. Sementara untuk roda 2 sebanyak 7 (tujuh) unit, serta beberapa alat pengolah data (Air Conditioner, Notebook, PC, Printer, dan lain-lain).

c. Penghapusan

Selama kurung waktu 2023 Pengadilan Agama Maros telah melakukan kegiatan penghapusan barang milik negara berupa Peralatan Mesin dan Meubelair dengan jumlah barang sebanyak 149 barang dengan total harga perolehan Rp. 297.913.149 dan nilai limit Rp. 2.889.100. dan nilai lelang sebesar Rp.3.999.999

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi *e-court*

Layanan perkara melalui sistem *e-court* pada Pengadilan Agama Maros Kelas IB tahun 2023 sebanyak 136 (Seratus tiga puluh enam) perkara. Proses peradilan dengan sistem *e-court* tersebut telah bisa diakses oleh para pihak/masyarakat secara umum.

2. Implementasi SIPP

Selama tahun 2023 Pengadilan Agama Maros Kelas IB sebagai salah satu entitas berada dibawah Mahkamah Agung RI telah mengelola Teknologi Informasi berupa SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang terkoneksi secara integral dan sistemik, yaitu kesatuan sistem kerja SIPP terhadap tugas para Hakim,

Adapun sarana dan prasarana terkait dengan SIPP yang tersedia saat ini ini adalah:

1) Perangkat Keras (*Hardware*)

Dalam rangka penguatan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Pengadilan Agama Maros, maka sarana dan prasarana yang menjadi perangkat keras (*Hardware*) yang tersedia adalah:

- Komputer (P.C unit) sebanyak 36 unit
- Laptop sebanyak 8 unit.
- Printer sebanyak 32 unit.

2) Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak (*software*) yang tersedia di Pengadilan Agama Maros adalah meliputi:

- a. Sistem operasi computer yang digunakan adalah Windows 7, dan Windows 10
- b. Aplikasi umum yang terpasang dan digunakan di *client* adalah:
 - Web Browser, yaitu : FIREFOX, GOOGLE CHROME
 - PDF Reader, yaitu: ACROBAT READER
 - Office, yaitu: Microsoft Office 2007 , Microsoft Office 2019 dan WPS
 - Kompresi, yaitu: WINRAR dan WINZIP
 - Antivirus, yaitu: SMADAV,

3. Aplikasi khusus yang terpasang dan digunakan untuk mendukung penyelesaian pekerjaan di Pengadilan Agama Maros adalah:

1) Administrasi perkara adalah:

- Aplikasi *e-court*,
- Aplikasi SIPP,
- Aplikasi SIPP Plus/ABT

- Aplikasi Antrian Sidang
 - Aplikasi Pendukung SIPP
 - Aplikasi Info Kinerja
 - Aplikasi DESPA
 - Aplikasi Hitung Panjar
 - Aplikasi Ewako
 - Aplikasi E-Keu/Register
 - Aplikasi Simtalak
 - Aplikasi Kinsatker
- 2) Administrasi Keuangan adalah:
- Aplikasi SAKTI
 - Aplikasi GPP
 - Aplikasi SPRINT
 - Aplikasi SIMPONI
 - Aplikasi Monev Anggaran
 - Aplikasi E-sadewa
- 3) Administrasi Kepegawaian / SDM adalah:
- Aplikasi SIKEP, yaitu jenis Aplikasi berupa Web Based
 - Aplikasi KOMDANAS
 - Aplikasi SIMTEPA
 - Aplikasi SI ASN
- 4) Administrasi Aset adalah:
- Aplikasi SIMAK BMN
 - Aplikasi PERSEDIAAN
 - Aplikasi SIMAN
- 5) Administrasi Perencanaan Anggaran dan Pelaporan
- Aplikasi SAKTI

- Aplikasi E-IPLANS
- Aplikasi MONEV BAPPENAS
- Aplikasi Smart DJA
- Aplikasi KOMDANAS
- Aplikasi Satu DJA
- Aplikasi OM SPAN

Sementara media informasi lainnya yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder/publik mengenai kondisi Pengadilan Agama Maros adalah melalui websitePengadilanAgamaMaros.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Maros Kelas IB menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah dilakukan/dicanangkan sejak Tahun 2019. Dan pada tahun 2021 Pengadilan Agama Maros Kelas IB mendapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, yaitu dengan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tanggal 20 Desember 2021. Selanjutnya tahun 2023 Pengadilan Agama Maros Kembali mencanangkan dan melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pengadilan Agama Maros telah diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahap penilaian TPI (Tim Penilai Internal), namun belum berhasil pada Tahap evaluasi penilaian TPN (Tim Penilai Nasional).



B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Maros Kelas IB adalah bentuk pelayanan satu meja kepada masyarakat umum dan para pencari keadilan berkaitan dengan proses berperkara maupun dengan pelayanan umum berkaitan tugas dan fungsi, serta kompetensi Pengadilan Agama Maros, yakni pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), dan transaksi Bank (pembayaran biaya perkara)

C. Inovasi Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah salah satu hal terpenting dalam Reformasi Birokrasi, yaitu dengan melaksanakan perubahan-perubahan dalam bentuk dan proses pelayanan publik yang lebih smart, efektif, dan efisien. Hal ini jelas ditaur dalam Peraturan MenpanRB Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenpanRB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan inovasi pelayanan publik dimaksud, Pengadilan Agama Maros Kelas IB terus berupaya melakukan inovasi dimaksud. Salah satunya adalah dengan menyediakan beberapa sarana dan prasarana yang ditujukan untuk pelayanan masyarakat dan/atau pencari keadilan. Hal tersebut dimaksudkan agar tercipta proses pelayanan publik yang adil, tertib, efektif, dan akuntabel. Beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Maros Kelas IB berkaitan dengan pelayanan publik adalah:

1. Mesin antrian sidang;
2. PTSP Online yang nyaman dan asri;
3. Layanan Perbankan;
4. Audio visual keadaan perkara/persidangan;
5. Drop Out Khusus disabilitas
6. Ruang Tunggu khusus disabilitas
7. Dan sarana teknologi informasi lainnya (Website, dan lain-lain)

Selain inovasi yang telah disebutkan, Pengadilan agama maros juga meluncurkan 6 inovasi layanan publik unggulan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada msasyarakat dalam mendapatkan layanan dari berbagai jenis layanan yang tersedia di Pengadilan Agama Maros. Adapun 6 (enam) inovasi tersebut tersebut:

1. Layanan Perubahan indentitas kependudukan pasca putusan dan penetapan Pengadilan Agama Maros (PADEKATE)
2. Layanan antar jemput pihak DIFABLE dalam perkara permohonan (AJEP)
3. Layanan penyerahan penetapan 10 (menit) pasca penetapan dibacakan majeleis Hakim (PESEN)
4. Layanan pendaftaran perkara 1 jam lebih awal (PEPES SAJALAH)
5. Layanan konseling bagi perempuan dan anak berhadapan dengan hukum (KOPER ABAH)
6. Layanan info produk penetapan, putusan dan akta cerai INDUK (LINDU)



Dari semua layanan yang diberikan, Pengadilan Agama Maros juga menyediakan souvenir kepada pencari keadilan apabila:

- 1) Petugas layanan Pengadilan Agama Maros tidak memberikan Senyum, Salam, sapa, sopan santun
- 2) Layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan
- 3) Melaporkan perilaku aparaturnya yang melanggar peraturan perundang-undangan
- 4) Dapat menyampaikan kekurangan atas layanan petugas Pengadilan Agama Maros

Penghargaan

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Maros mendapatkan penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai bentuk prestasi atas kinerja pengadilan Agama Maros. Adapun Penghargaan-Penghargaan yang diperoleh adalah

1. Peringkat III dalam Penilaian DIPA 04 Sidang keliling



2. Peringkat III dalam Penilaian Jumlah Perkara yang Berhasil Damai dalam Mediasi



3. Peringkat III dalam Persentase perkara E-Court tertinggi



4. Peringkat III dalam Penilaian Kepatuhan Perkara



5. Peringkat II dalam penilaian penyampaian laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Tercepat tahun 2022



BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, dan untuk mewujudkan Badan Peradilan yang agung, merupakan visi mahkamah agung yang dimuat dalam cetak biru Mahkamah Agung 2010-2023. Mahkamah agung telah mengambil peran dalam rangka menanggapi visi tersebut. Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak bisa dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian pengawasan di lingkungan peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Disamping kedua pengawasan tersebut juga terdapat pengawasan rutin

1. PENGAWASAN MELEKAT

Di dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku. Di Pengadilan Agama Maros pengawasan melekat dilakukan oleh ketua

Pengadilan Agama Maros dengan cara terus-menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodik. Untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal, ketua Pengadilan Agama Maros telah membentuk Hakim pengawas bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maros : 140/KPA.W20-A5/SK.HK2.6/X/2023 tentang Hakim Pengawas Bidang pengadilan Agama Maros Kelas IB tahun 2023 yaitu:

1. Muhammad Arif , S.H.I.,M.H. sebagai Koordinator Pengawas
2. Drs. H. muh. Hasbi, M.H. sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi perkara dan Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan
3. Mahyuddin, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
4. Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan , Hakim pengawas Bidang, Pelayanan Publik, Hakim Pengawas Bidang Umum dan keuangan
5. Ahmad Zaki Yamani, S.H. sebagai Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan

Hakim pengawas tersebut melaksanakan tugas pengawasan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengawas Bidang Manajemen Peradilan
 - Program Ketja
 - Pengawasan dan pembinaan
 - Pelaksanaan pencapaian target
 - Evaluasi kegiatan
2. Pengawasan Bidang Administrasi Perkara

- Prosedur Penerimaan Perkara
 - Prosedur Penerimaan Permohonan banding
 - Prosedur Penerimaan Permohonan kasasi
 - Prosedur Penerimaan Peninjauan Kembali
 - Buku Register
 - Keuangan Perkara
3. Pengawasan Bidang Administrasi persidangan
- Penetapan Majelis Hakim
 - Penetapan Hari sidang
 - Panggilan para pihak
 - Berita acara persidangan
 - Ketetapan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara
 - Mutasi Perkara
 - Pelaksanaan putusan (eksekusi)
4. Hakim Pengawas Bidang pelayanan Publik
- Mekanisme prosedur pelayanan publik
 - Penata usahaan pelayanan publik
 - Kecakapan para petugas PTSP
 - Pengawasan pada kondisi tata ruang PTSP
 - Mekanisme penyampaian jenis informasi
5. Pengawas Bidang Umum dan Keuangan
- Penatausahaan inventaris

- Pengelolaan tata persuratan
 - Penatausahaan keuangan
 - Mekanisme pengelolaan anggaran DIPA
 - Mekanisme pertanggungjawaban Anggaran
 - Pelaporan Realisasi Anggaran
 - Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa
6. Pengawas Bidang kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
- Kelengkapan penatausahaan kepegawaian
 - Sasaran Kinerja Pegawai
 - Daftar Urut kepangkatan
 - Pengelolaan Kenaikan pangkat
 - Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala
 - Pendidikan dan Penjurusan
 - Pengelolaan Absensi
 - Pengisian Jabatan
 - Pengusulan pensiun pegawai
7. Pengawasan Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
- Mekanisme dan penatausahaan perencanaan anggaran
 - Pengelolaan sarana Teknologi Informasi
 - Mekanisme dan penatausahaan pelaporan

2. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam instruksi presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf C adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Maros dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar selaku atasan langsung dan Badan pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. PENGAWASAN RUTIN

Pengadilan Agama Maros dalam melaksanakan Pengawasan rutin terhadap kewenangan masing-masing bagian dilakukan baik langsung oleh ketua pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Mahkamah Agung RI.

B. Evaluasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab seluruh entitas Pengadilan Agama Maros Kelas IB selama tahun 2023 secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan dan Akreditasi Penjaminan Mutu, serta standar dalam Zona Integritas. Namun tidak dipungkiri masih terdapat beberapa kekurangan sebagai bahan perbaikan dan mbenahan secara konstruktif, sistemik dan terstruktur, sehingga mencapai hasil yang baik dan maksimal di kemudian hari.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka dilakukan beberapa evaluasi secara menyeluruh terkait dengan hasil monitoring dan pengawasan dengan melakukan perbaikan-perbaikan, baik yang sifatnya teknis maupun nonteknis.

BAB VII

PEN UTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Agama Maros Kelas IB dari tahun ke tahun telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan berbagai kegiatan dan pembaharuan, khususnya terkait dengan tugas dan gungsi di bidang tatakelolah teknis yudisial (keperkaraan) maupun non-yudisial (kesekretariatan), termasuk juga peningkatan pelayanan publik. Hal tersebut semuanya merupakan implementasi konkrit dari amanat reformasi birokrasi.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maros Kelas IB semakin berkembang, baik pelayanan publik, ketersediaan saranaa dan prasarana, maupun dukungan teknologi informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi secara prima, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Sehubungan dengan uraian diatas, dalam kurun waktu tahun 2023, beberapa hal dapat di simpulkan, yaitu:

1. Pelayanan Publik

Sarana prasarana (berupa CCTV) masih sangat kurang, sehingga berefek pada tingkat kemananan dan monitoring berkaitan dengan bahan pengawasan, penilaian dan evaluasi. Kemudian keberadaan sarana Genset yang sangat diperlukan sebagai cadangan energi listrik dalam menopang kelancaran pelayanan di Pengadilan Agama Maros dikarenakan terkadang listrik PLN padam sehingga memerlukan alternatif lain untuk membuat listrik d kantor tetap menyala.

2. Teknis Yudisial (Keperkaraan)

Secara umum telah berjalan baik dan maksimal, namun dalam beberapa hal khususnya terkait dengan sistem pelayanan publik perlu senantiasa dilaksanakan secara konsisten dan/atau *sustainable* sesuai ketentuan yang ada, seperti layanan PTSP, pelaksanaan SIPP, yang secara

sistemik telah berjalan namun perlu dilaksanakan secara lebih baik lagi dan berkesinambungan (*sustainable*)

3. Teknis Non Yudisial (Keseekretariatan)

Pelayanan dukungan (*supporting unit*) oleh bidang keseekretariatan secara umum telah berjalan baik dan maksimal. Tetapi dari beberapa hal perlu ditingkatkan lagi, khususnya terkait dengan tertib tatakelola perencanaan agar lebih akomodatif, tatakelola kepegawaian dan Ortala agar lebih tertib dan disiplin, tatakelola sarana dan prasarana lebih ditingkatkan sistem pemeliharaan dan identifikasi kebutuhan kantor/masing-masing pegawai, serta tatakelola keuangan agar lebih efektif dan efisien,

B. Rekomendasi

Berbagai capaian Pengadilan Agama Maros yang terurai diatas, tentunya masih terdapat beberapa hal yang merupakan kekurangan yang tidak prinsipil namun perlu perbaikan dan dukungan dari berbagai pihak.

Dalam rangka memehuni hal tersebut, maka Pengadilan Agama Maros Kelas IB merekomendasikan beberapa hal:

1. Mengharapkan pimpinan Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Keuangan agar memperhatikan alokasi anggaran terkait dengan pengadaan Tanah dan bangunan Pengadilan Agama Maros sebagaimana temuan hakim pengawas bidang pada periode pengawasan triwulan IV agar di adakan Pengadaan Tanah dan bangunan untuk pembangunan kantor baru Pengadilan Agama Maros mengingat semakin hari SDM di Pengadilan Agama Maros semakin bertambah sedangkan kapasitas daya tampung kantor pengadilan Agama Maros sudah tidak memungkinkan lagi jika Kembali ada penambahan SDM, termasuk juga kendaraan roda 4 agar dapat diberikan belanja modal mengingat kendaraan operasional roda 4 sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja aparatur Pengadilan Agama Maros.
2. Teknis Yudisial (Keperkaraan)

Sumber Daya Manusia dan dukungan sarana prasarana (alat pengelolah data, peralatan dan mesin, meubelair, dan lain-lain) perlu diperhatikan dan

ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas. Intensitas kegiatan pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan dan ditingkatkan dalam rangka mendukung kompetensi teknis dan manajerial. Hal ini penting karena sebagai sumber utama dari pelaksanaan sistem pelayanan publik secara baik, maksimal, dan *sustainable*.

3. Teknis Non Yudisial (Kesekretariatan)

Inovasi pelayanan publik dari sisi ketersediaan dukungan budget dan sarana prasarana perlu dilakukan peremajaan dan mendapat perhatian ekstra untuk diadakan dan dianggarkan lebih proporsional. Karena tingkat keberadaan (*representative*) sarana prasarana secara langsung berdampak sistemik pula terhadap fungsi-fungsi *supporting unit* berkaitan dengan proses-proses perkara, khususnya dukungan pelayanan publik bagi masyarakat umum/pencari keadilan. Sarana prasarana tersebut antara lain; alat pengolah data, meubelair, Air Conditioner, dan sarana pendukung lainnya.